

**Pengaruh Perang Proksi Rusia-Turki di Suriah terhadap
Stabilitas Kawasan Timur Tengah**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik*

OLEH:

ALIF RYADUSSOLIHIN R

E061181309

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PENGARUH PERANG PROKSI RUSIA-TURKI DI SURIAH
TERHADAP STABILITAS KAWASAN TIMUR TENGAH

N A M A : ALIF RYADUSSOLIHIN R.

N I M : E061181309

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 16 Mei 2023

Mengetahui :

Pembimbing I,



Agussalim, S.IP, MIRAP
NIP. 197608182005011003

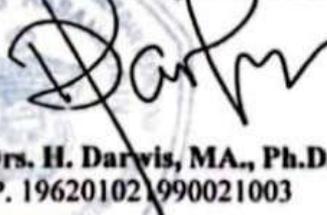
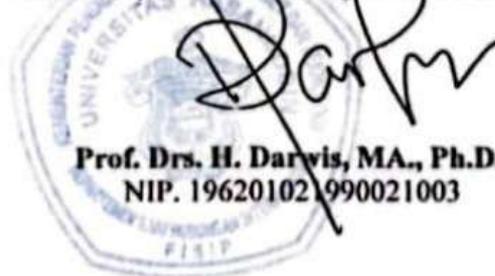
Pembimbing II,



Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,

Prof. Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PENGARUH PERANG PROKSI RUSIA-TURKI DI SURIAH
TERHADAP STABILITAS KAWASAN TIMUR TENGAH

NAMA : ALIF RYADUSSOLIHIN R.

NIM : E061181309

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 5 Mei 2023.



Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. H.M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

2. Muh. Nasir Badu, S.Sos, M.Hum, Ph.D.

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alif Ryadussolihin R.
NIM : E061181309
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Pengaruh Perang Proksi Rusia-Turki di Suriah terhadap Stabilitas Kawasan Timur Tengah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri dan bukan pencurian hasil karya serta pemikiran orang lain, termasuk segala bentuk kemungkinan tindak plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan perbuatan saya dan menerima sanksi yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kesadaran sendiri tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 15 Juni 2023

Yang Menyatakan



Alif Ryadussolihin R.

E061181309

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alif Ryadussolihin R.

NIM : E061181309

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Departemen : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Ilmiah

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (Non-eksklusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pengaruh Perang Proksi Rusia-Turki di Suriah terhadap Stabilitas Kawasan Timur Tengah

Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Makassar

Pada Tanggal : 15 Juni 2023

Yang menyatakan,



(Alif Ryadussolihin R.)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul “**Pengaruh Perang Proksi Rusia-Turki di Suriah terhadap Stabilitas Keamanan Kawasan Timur Tengah Pasca Arab Spring**” sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, serta berbagai kendala yang dialami oleh Penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik serta saran yang membangun dari para pembaca tentunya sangat diperlukan agar kedepannya Penulis dapat menghasilkan karya yang lebih baik. Skripsi ini disusun dengan baik berkat bantuan dari banyak pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada Penulis. Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya Penulis sampaikan kepada keluarga besar, khususnya kedua Orang Tua serta saudara-saudara Saya tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi, dan juga doa yang membantu kelancaran penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc** beserta jajarannya.
2. Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-2022, Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M. A**, beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, **Dr. Phil. Sukri, M. Si** dan jajarannya serta seluruh staf fakultas.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. Drs. H. Darwis, M.A, Ph. D**.
5. Bapak **Agussalim Burhanuddin S. IP, MIRAP** selaku dosen pembimbing I, dan **Abdul Razak Z. Cangara S. IP, M. Si, MIR**, selaku dosen pembimbing II.

6. Seluruh dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional dan juga seluruh staf Departemen yang telah membantu.
7. Untuk Saudara-saudaraku Alprian Madani, Abrar Kiran, dan Rini Andini S.
8. Untuk seluruh Sahabat-sahabatku, kolega organisasi, teman seangkatan REFORMA 18 dan juga teman seperjuangan penulis yang selama ini menjadi *support system*.

Penulis mengucapkan permohonan maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Semoga kedepannya penulis dapat tetap berkontribusi dan menghasilkan penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. Akhir kata Penulis kembali mengucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Alif Ryadussolihin R

Penulis

ABSTRAKSI

Alif Ryadussolihin R (E061181309), “Pengaruh Perang Proksi Rusia-Turki di Suriah Terhadap Stabilitas Kawasan Timur Tengah”, di bawah bimbingan **Agussalim Burhanuddin S. IP, MIRAP** selaku dosen pembimbing I, dan **Abdul Razak Z. Cangara S. IP, M. Si, MIR** selaku dosen pembimbing II pada departemen ilmu hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perang proksi antara Rusia dan Turki dalam konflik Suriah serta bagaimana pengaruh konflik Suriah terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka. Adapun dalam menganalisa bentuk perang proksi Rusia-Turki di Suriah digunakan menggunakan konsep perang proksi (*Proxy War*). Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh konflik Suriah terhadap stabilitas Kawasan Timur Tengah dibedah berdasarkan konsep kompleks keamanan kawasan (*Regional Security Complex*). Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perang proksi yang dilakukan Rusia-Turki di Suriah dalam bentuk *soft power* dan *hard power*. Kedua negara memberikan bantuan berupa pengiriman senjata dan alutsista, dukungan finansial, dukungan- dukungan dalam forum-forum internasional, bahkan intervensi militer secara langsung. Kemudian perang proksi tersebut menyebabkan terjadinya instabilitas tidak hanya di Suriah, namun juga pada tingkat regional hingga global.

Kata Kunci: Perang Proksi, Kompleks Keamanan Kawasan, *Arab Spring*, Suriah, Timur Tengah

ABSTRACT

Alif Ryadussolihin R (E061181309), "The Effect of the Russian-Turkish Proxy War in Syria to the Regional Stability in the Middle East", under the direction **Agussalim Burhanuddin S. IP, MIRAP** as the first supervisor, and **Abdul Razar Cangara S. IP, Ph. D,** as the second supervisor at the department of international relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the form of a proxy war between Russia and Turkey in the Syrian conflict and how the Syrian conflict influences the stability of the Middle East region. This study used a qualitative research method, collecting data through literature reviews. A proxy war concept describes the form of the Russian-Turkish proxy war in Syria. Furthermore, to find out the influence of the Syrian conflict on the stability of the Middle East Region, it is dissected based on the concept Regional Security Complex. The results of this study explain that the proxy war carried out by Russia-Turkey in Syria has escalated the conflict so that conditions in Syria have become increasingly difficult to control. Then these conditions have provoked external forces to get involved in conflicts that have caused polarization so that the Middle East region is again heating up and experiencing instability.

Keywords: Arab Spring, Middle East, Proxy War, Regional Security Complex, Syria.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| HALAMAN JUDUL..... | |
| KATA PENGANTAR..... | i |
| ABSTRAKSI..... | iii |
| ABSTRACT..... | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| DAFTAR BAGAN..... | ix |
| DAFTAR SINGKATAN..... | x |
| BAB I: PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Batasan dan rumusan masalah | 6 |
| C. Tujuan dan manfaat penelitian..... | 7 |
| D. Kerangka Konseptual | 8 |
| 1. Perang Proksi..... | 8 |
| 2. Kompleks Keamanan Kawasan (Regional Security Complex) | 13 |
| 3. Operasionalisasi Variabel | 20 |
| 4. Model Analisis | 22 |
| E. Metode Penelitian | 23 |
| 1. Tipe Penelitian..... | 23 |
| 2. Jenis Data | 23 |

| | | |
|--------------------------------------|--|------------|
| 3. | Teknik Pengumpulan Data..... | 24 |
| 4. | Teknik Analisis Data | 24 |
| F. | Sistematika Penulisan | 25 |
| BAB II: TINJAUAN PUSTAKA..... | | 26 |
| A. | Perang Proksi | 26 |
| B. | Kepentingan Nasional | 34 |
| C. | Kompleks Keamanan Kawasan (<i>Regional Security Complex</i>).... | 45 |
| D. | Penelitian Terdahulu | 47 |
| BAB III GAMBARAN UMUM..... | | 52 |
| A. | Dinamika Stabilitas Politik dan Keamanan Timur Tengah | 52 |
| B. | Dinamika Stabilitas Politik dan Keamanan Negara Suriah | 61 |
| BAB IV: PEMBAHASAN..... | | 81 |
| A. | Bentuk Perang Proksi Rusia-Turki | 81 |
| B. | Kompleks Keamanan Kawasan Timur Tengah Pasca Arab Spring . | 99 |
| 1. | Kondisi Domestik Negara Suriah..... | 102 |
| 2. | Keterlibatan Aktor Regional | 106 |
| 3. | Keterlibatan Negara Super Power | 123 |
| BAB V: PENUTUP..... | | 138 |
| A. | Kesimpulan | 138 |
| B. | Saran..... | 142 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 145 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel | 20 |
|--|----|

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| Gambar 1.1 Keadaan Negara-Negara Timur Tengah Pasca <i>Arab Spring</i> | 2 |
| Gambar 3. 1 Peta Timur Tengah | 53 |
| Gambar 3. 2 Peta Negara Suriah | 62 |
| Gambar 4. 1 Peta Konflik Suriah | 94 |
| Gambar 4. 2 Polarisasi Negara-negara di Timur Tengah | 106 |
| Gambar 4. 3 Peta Persebaran Hegemoni Sunni-Syiah | 116 |
| Gambar 4. 4 Persaingan Jalur Pipa Gas Qatar-Iran..... | 119 |
| Gambar 4. 5 Peta persebaran pasukan militer Rusia dan AS..... | 123 |
| Gambar 4. 6 Peta aliansi Rusia dan AS di Timur Tengah | 125 |
| Gambar 4. 7 Pangkalan Militer Rusia di Suriah | 127 |

DAFTAR BAGAN

| | |
|---|-----|
| Bagan 1.1 Model Analisis | 22 |
| Bagan 4. 1 Konflik Aktor Sipil Suriah..... | 105 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|--------|---|
| AFV | <i>Armoured Fighting Vehicle</i> |
| AS | Amerika Serikat |
| BBC | British Broadcasting Corporation |
| BBCN | British Broadcasting Corporation News |
| BTR | bronetransportyor |
| DCA | Defence Cooperation Agreement |
| DK | Dewan Keamanan |
| FSA | Free Syrian Army |
| GNA | Government of National Accords |
| HAM | Hak Asasi Manusia |
| HF | High Frequency |
| ICC | International Court of Justice |
| IRGC | Islamic Revolutionary Guard Corps |
| IS | Islamic State |
| ISIS | Islamic State of Iraq and Syria |
| LNA | Libyan National Army |
| MIT | Millî İstihbarat Teşkilat |
| MOC | Military Operation Center |
| NATO | North Atlantic Treaty Organization |
| NDF | National Defence Force |
| OKI | Organisasi Kerjasama Islam |
| PBB | Perserikatan Bangsa-Bangsa |
| RAF | Rote Armee Frajtion |
| RSC | Regional Security Complex |
| SDF | Syria Democratic Forces |
| SNC | Syrian National Council |
| SNHR | Syrian Network for Human |
| SOC | Syrian Oppotion Coalition |
| TOW | Tube launched optically tracked weapon |
| UNSMIS | United Nations Supervision Mission in Syria |
| USD | United States Dollar |
| USIP | United State Institute of Peace |
| VHF | Veri High Frequency |

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada penghujung tahun 2010 hingga sepanjang tahun 2011 terjadi sebuah peristiwa gelombang protes besar-besaran yang terjadi di Timur Tengah yang disebut sebagai peristiwa *Arab Spring* atau Musim Semi Arab. Aksi ini merupakan bentuk gelombang protes menuntut terbentuknya sistem pemerintahan demokrasi dan menantang rezim otoriter yang sebagian besar mendarah daging di kawasan tersebut. Dimulai di Tunisia, aksi protes ini diawali oleh aksi pembakaran diri Mohammad Boazizi yaitu seorang pedagang kaki lima berusia 26 tahun di Tunisia yang saat itu tidak puas dengan pemerintah terhadapnya. Hal tersebut kemudian memicu sebuah gerakan yang dikenal dengan revolusi melati oleh penduduk. Melalui media massa aksi pembakaran tersebut kemudian dengan cepat mendorong publik untuk bersama-sama melakukan gerakan protes. Bahkan tidak hanya di Tunisia bahkan beberapa negara disekitarnya yang memiliki sistem pemerintahan yang sama (Augustyn, 2022).

Didorong oleh keberhasilan penggulingan rezim di Tunisia, Dengan cepat aksi menyebar ke Yaman, Mesir, Libya, Bahrain, Suriah dan beberapa Negara lainnya (Augustyn, 2022) . Revolusi yang di topang oleh kekuatan rakyat itu menghendaki terjadinya tatanan pemerintahan yang baru yang lebih demokratis (Rofii, 2022). Namun tidak setiap negara mendapatkan hasil yang baik bahkan para demonstran yang mengungkapkan keluhan politik dan

ekonomi mereka terhadap pemerintah seringkali mendapat respon yang baik dari pemerintah yang saat itu berkuasa beberapa diantaranya bahkan mendapatkan tindakan represif hingga aksi pembunuhan oleh pihak militer karena dianggap sebagai pemberontak dan pengkhianat negara (Augustyn, 2022). Bahkan yang berhasil menumbangkan rezim pun tidak mampu melewati masa transisi yang sulit sehingga jatuh kedalam perang saudara (Rofii, 2022).



Gambar 1.1 Keadaan Negara-Negara Timur Tengah Pasca *Arab Spring*

Sumber: The Economist, 2014

Semenjak terjadinya fenomena Arab Spring, Proses menuju demokratisasi di Timur Tengah nampaknya tidak berjalan dengan baik. Begitupun dengan kondisi politik dan keamanan tidak pulih secara langsung. Bahkan kawasan ini mengalami penurunan dari aspek sosial, ekonomi, dan politik. Gambar diatas menunjukkan keadaan negara-negara di Timur Tengah

Pasca Arab Spring. Instabilitas di Timur Tengah ternyata disebabkan oleh perang saudara yang berlarut-larut. Setelah ditelaah lebih jauh perang saudara yang terjadi di beberapa negara Timur Tengah melibatkan banyak aktor tidak hanya aktor domestik saja akan tetapi juga aktor regional maupun global. Berdasarkan ciri-cirinya maka dapat disimpulkan bahwa instabilitas yang terjadi di Timur Tengah selama beberapa tahun pasca Arab Spring disebabkan oleh perang proksi yang terjadi.

Suriah merupakan salah satu negara yang mengalami Perang Proksi. Masa transisi menuju demokrasi di suriah hanyalah cita-cita masyarakat yang tidak kunjung terwujud. Seperti yang terjadi di beberapa negara Arab lainnya, Suriah juga jatuh kedalam konflik internal. Masyarakat yang tadinya berharap revolusi dapat terjadi melalui pemilihan umum mendapat penolakan dari pemerintah. Bashar Al-Assad selaku diktator negara itu memilih untuk merespon gerakan masyarakat tersebut dengan jalan kekerasan melalui militer yang sangat represif. Masyarakat pun yang tadinya berjuang dengan jalan damai dan demokratis berubah menjadi gerakan kelompok pemberontak bersenjata yang didukung oleh sejumlah petinggi militer. Kelompok tersebut terdiri dari beberapa faksi yang berbeda. Seperti yang terjadi di negara tetangganya yaitu Libya, Suriah pun jatuh kedalam konflik saudara antara Rezim Bashar Al-Assad dan Kelompok Oposisi (securitycouncilreport, 2022).

Selama konflik berlangsung kedua kubu masing-masing berusaha mencari dukungan dari dunia internasional untuk memperkuat posisi mereka.

Respon dari dunia internasional pun berbeda-beda dan membentuk pola aliansi atau perang proksi. Rezim Bashar Al-Assad berhasil mendapat dukungan dari Rusia dan Iran sedangkan pihak oposisi mendapat dukungan dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Turki, dan beberapa negara anggota Liga Arab (securitycouncilreport, 2022). Pihak Pemberontak mendapatkan bantuan dalam bentuk dana. Selain bantuan dalam bentuk dana, Turki juga membantu memfasilitasi Kelompok-kelompok oposisi tersebut dengan menyediakan base camp dan memberikan pengamanan dan akses keluar masuk Turki-Suriah. Turki juga memberikan dukungan moral kepada kelompok pemberontak untuk menumbangkan rezim Bashar Al-Assad atas dasar kemanusiaan.

Dukungan tersebut disampaikan oleh Turki melalui forum-forum internasional seperti pertemuan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) di Djibouti tahun 2012 dan Turki juga membujuk anggota North Atlantic Treaty Organization (NATO) seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk turut mendukung kelompok oposisi tersebut dalam rangka menghentikan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Suriah yang dilakukan oleh rezim Bazhar al-Assad (Hayundaka, 2020). Sementara itu, Rusia terlihat sangat bersikeras dalam mempertahankan rezim Al-Assad. Suriah merupakan sekutu terdekat Rusia di Timur Tengah dalam mengamankan pengaruh militernya. Terdapat dua pangkalan militer Rusia yang beroperasi di suriah yaitu berada di Provinsi Barat Latakia serta pangkalan angkatan laut di kota pelabuhan Suriah. Peran Rusia di Suriah sangatlah berpengaruh dan membawa

perubahan yang sangat signifikan sebagai penyedia utama pasukan dan persenjataan di Suriah (Saputra, 2018).

Sebenarnya ada banyak negara yang terlibat perang proksi di suriah, namun penulis mengambil Perang Proksi Rusia-Turki untuk diteliti. Baik Rusia maupun Turki, keduanya merupakan pemain paling aktif dalam menjalankan proksinya di Suriah sejak awal konflik suriah terjadi. Rusia memiliki hubungan dekat dengan Suriah yang berlangsung sejak lama, bahkan Rusia dan Suriah memiliki perjanjian bilateral mengenai pertahanan dan keamanan. Selain itu juga Rusia berupaya memperluas hegemoninya di Timur Tengah dan mencegah pengaruh barat meluas diwilayah tersebut.

Maka dari itu Suriah adalah mitra penting Rusia di timur Tengah dan sudah semestinya Rusia membantu Suriah dalam mempertahankan pemerintahannya dari pihak pemberontak. Sedangkan Turki sendiri memiliki sejarah yang buruk dengan Suriah. Meskipun hubungan Turki dan Suriah sempat membaik sejak kebijakan luar negeri “Zero Enemy” yang diberlakukan oleh Turki. Namun sikap Bashar Al-Assad dalam merespon demonstran tidak bisa dibiarkan dan dikecam oleh presiden Erdogan. Sejak saat itu Turki terlibat dalam konflik Suriah untuk membantu pihak pemberontak yang menginginkan pergantian rezim. Turki ingin tampil sebagai kekuatan regional baru di Timur Tengah setelah Arab Saudi di nilai semakin melunak dan berkurang pengaruhnya. Selain itu atas dasar kemanusiaan dan juga konfrontasi Turki dengan suku Kurdi di sebelah Utara Suriah.

Perang proksi yang melibatkan Rusia dan Turki ini tentunya memiliki implikasi terhadap dinamika konflik yang ada di Suriah. Menurut dokumen yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Perang yang terjadi di Suriah merupakan bentuk perang proksi karena melibatkan Kekuatan dari luar seperti Rusia, Amerika, Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Mesir sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan instabilitas tidak hanya di Suriah saja, namun juga berpengaruh ke kawasan hingga global (Poltak Partogi Nainggolan, 2022).

Seorang Pengamat geopolitik, (Cohen, 2009) dalam bukunya yang berjudul “Geopolitics: The Geography of International Relations” mengatakan konflik internal yang akut dan masuknya intervensi asing membuat Timur Tengah dikategorikan sebagai kawasan shatterbelt, yaitu kawasan yang memiliki tingkat instabilitas yang tinggi. Tingginya tingkat instabilitas tersebut tentunya membawa dampak bagi banyak negara baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan hal tersebut penulis ingin meneliti lebih lanjut terkait “Pengaruh Perang Proksi Rusia-Turki di Suriah terhadap Stabilitas Kawasan Timur Tengah”.

B. Batasan dan rumusan masalah

Untuk Memfokuskan kajian penelitian ini penulis membatasi penelitian yaitu hanya mengambil perang proksi antara Rusia-Turki yang terjadi di negara Suriah pasca Arab Spring hingga tahun 2017.

Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana bentuk perang proksi antara Rusia-Turki di Timur Tengah?
- b. Bagaimana dampak perang proksi yang terjadi antara Rusia dan Turki terhadap Stabilitas kawasan di Timur Tengah?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk proksi yang dilakukan oleh kedua negara baik Rusia maupun Turki.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari perang proksi tersebut terhadap stabilitas kawasan di Timur Tengah.

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Memberikan gambaran tentang bentuk perang proksi yang dilakukan oleh kedua negara serta bagaimanakah pengaruhnya terhadap stabilitas di Timur Tengah.
2. Dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dengan menjadi sumber referensi tambahan bagi para mahasiswa dalam mengkaji studi hubungan internasional.
3. Dengan adanya penelitian ini semoga mampu memberikan pemahaman tentang konsep perang proksi.

4. Mampu menjelaskan dan memberikan pemahaman tentang bagaimana perang proksi dan pengaruhnya terhadap kawasan di Timur Tengah.

D. Kerangka Konseptual

1. Perang Proksi

Perang proksi (*Proxy war*) merupakan perang antar dua aktor negara maupun non negara secara tidak langsung. Perang jenis ini melibatkan aktor lain sebagai perpanjangan tangan dari pihak yang sedang berperang untuk menghancurkan pihak lain. Pihak yang sedang menjalankan proksi memiliki hubungan yang erat dengan negara atau aktor bonekanya. Hubungan itu dapat berupa bantuan finansial, pengiriman alutsista, pelatihan kemiliteran, dan sebagainya untuk memastikan perang terus berjalan sehingga kepentingannya dapat tercapai. Pihak lain tersebut harus memiliki hubungan yang erat dan lama dengan pihak yang bertikai baik dalam bentuk pendanaan, pelatihan militer, dan lain-lain yang dapat memastikan perang terus berjalan. Pihak-pihak yang sedang menjalankan proksi seringkali menggunakan aktor non-negara, tentara bayaran, dan kelompok-kelompok tertentu yang diharapkan bisa menyerang lawan tanpa menimbulkan resiko yang besar (BNN Riau, 2021).

Perang proksi merupakan bentuk istilah baru di era perang modern. Berbeda dengan perang-perang yang pernah terjadi sebelumnya dimana militer kedua pihak yang bertikai melakukan konfrontasi secara langsung (Munarji H, 2018). Menurut Kamus Oxford dalam (Gunawan, 2017) menyatakan bahwa perang proksi sebagai sebuah perang tanpa terlibat

secara langsung. Dalam kamus tertulis “*A war instigated by a major power which does not itself become involved*” yaitu sebuah perang yang terjadi dengan kekuatan besar dibaliknya. Pihak-pihak yang berperang hanya perpanjangan tangan dari sebuah *major power* dibalik proksi. Sedangkan definisi perang proksi yang diterbitkan oleh reference.com berbunyi “*A proxy war is a conflict inflicted by a major power or powers that do not become involved in it directly. Often, proxy war involve countries fighting their opponents’ allies or helping their allies fight their opponents*”. Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa perang proksi adalah sebuah perang yang ditimbulkan oleh kekuatan-kekuatan besar yang tidak terlibat secara langsung didalamnya. Seringkali perang proksi melibatkan aktor yang saling bersekutu berperang melawan musuh mereka atau membantu berperang melawan sekutu lawan (Gunawan, 2017).₂

Meskipun merupakan istilah baru perang proksi sendiri muncul setelah era perang dunia terjadi. Negara-negara besar yang terlibat pada perang dunia pertama dan kedua setelah itu tidak lagi ingin mengambil resiko yang lebih besar. Perang proksi telah mulai berkembang di era perang dingin yaitu pertempuran dua kekuatan besar dunia saat itu antara Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam menyebarluaskan pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia. Alih-alih perang secara langsung, kedua negara paham akan resiko yang akan terjadi. Oleh karenanya mereka hanya memberi dukungan dan mempersenjatai pihak ketiga.

Inilah yang disebut sebagai perang proksi dimana dua kekuatan besar saling berperang namun menggunakan aktor lain atau pihak ketiga sebagai gantinya. Pasca perang dingin juga demikian Seperti Jerman Timur memberi dukungan kepada *Rote Armee Fraktion* (RAF) sebagai bentuk perlawanan terhadap Jerman Barat, China yang mendukung Khmer Merah di tahun 1970 di Kamboja dalam rangka memerangi pengaruh dari Vietnam. Contoh lain yaitu Ketika Libya memberikan bantuan persenjataan kepada tentara Republik Irlandia untuk memerangi kerajaan Inggris pada saat itu (Munarji H, 2018).

Menurut Jon Abbink seorang professor bidang politik dan pemerintahan di Universitas Leiden Afrika dalam (Munarji H, 2018) bahwa perang proksi diibaratkan sebagai permainan Catur dimana strategi yang digunakan itu selalu berubah-ubah. Begitupun negara dalam melaksanakan perang proksi kebijakan yang diambil pun tidak menentu dan selalu berubah. Dalam perang proksi, sebuah negara berusaha untuk mencapai kepentingan strategisnya dengan menghindari keterlibatan secara langsung karena biaya yang mahal dan berisiko tinggi. Perang proksi seringkali menjadi sebuah kebijakan yang dirahasiakan oleh suatu negara yang menjadi pemain. Karena sifatnya yang rahasia tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah negara memiliki kepentingan khusus dalam sebuah konflik yang terjadi di negara tertentu maupun di level regional. Demi tercapainya kepentingan nasional dan kemajuan negaranya beberapa aktor negara bahkan tidak segan-segan mengorbankan negara lain. Maka dari itulah

terkadang aktor negara tidak memperdulikan perjanjian maupun norma-norma yang berlaku secara internasional. Sebuah negara tidak segan memberi bantuan dan suntikan dana terhadap pihak ketiga. Dengan itu mereka bisa mengendalikan aktor tersebut (Munarji H, 2018).

Perang semacam ini melibatkan banyak pihak baik itu aktor negara maupun non negara yang masing-masing memiliki kepentingan terhadap konflik yang terjadi. Aktor-aktor yang terlibat biasanya tidak akan terlihat secara langsung di medan pertempuran. Akan tetapi kehadiran mereka akan diwakili oleh aktor-aktor lain yang dijadikan sebagai aktor boneka. Perilaku aktor yang berperang secara langsung juga dipengaruhi oleh aktor lain dibelakangnya. Berbeda dengan perang konvensional, perang proksi merupakan perang yang begitu kompleks. Peperangan tidak hanya melibatkan dua kubu akan tetapi melibatkan banyak aktor luar yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kepentingan ini biasanya tidak terlihat namun ada motif tertentu yang tersirat yang memancing mereka untuk terlibat dalam perang yang terjadi baik itu menyangkut masalah geopolitik maupun masalah perluasan hegemoni. Karena perang proksi adalah perang yang begitu kompleks karena melibatkan banyak pihak dan adanya kepentingan yang berbeda-beda maka konflik bersenjata yang terjadi akan berlangsung lebih lama karena perang proksi akan menyebabkan instabilitas keamanan di wilayah yang berkonflik (Fahrudin, 2022).

Di era modern seperti saat ini, munculnya berbagai aktor baru dalam hubungan internasional seperti kelompok terorisme, MNC, organisasi kejahatan transnasional, dan kelompok-kelompok separatis membuat perang proksi semakin efisien dan marak terjadi (Munarji H, 2018). Terminologi perang proksi pun kian meluas seiring dengan perkembangan jaman terutama menyangkut dengan perang proksi melalui media dan teknologi informasi. Selain itu muncul nya berbagai aktor-aktor baru non negara menyebabkan perang proksi kian masif. Saat ini perang proksi tidak hanya berlaku untuk aktor negara melawan negara saja namun bisa saja antara negara dan non negara_(BNN Riau, 2021).

Perang proksi dapat dilakukan dengan pendekatan *soft power* maupun *hard power*. Bentuk *soft power* seperti menggunakan perangkat ekonomi, teknologi dan informasi serta instrumen lainnya yang dapat digunakan dalam menyerang lawan secara tidak langsung. Sedangkan metode *hard power* dapat menggunakan perangkat politik dan perangkat militer (Gunawan, 2017). Salah satu aktor yang kerap kali menjadi bidak catur oleh negara-negara *super power* yaitu kelompok separatis. Kelompok-kelompok tersebut seringkali dipersenjatai dan diberikan pelatihan militer guna melawan sebuah rezim, negara, maupun untuk memberikan ancaman terhadap negara lain sehingga menimbulkan ketidakstabilan politik dan keamanan baik secara domestik maupun regional dan internasional. Banyak kasus seperti itu terjadi di Timur Tengah, terutama masa pasca fenomena arab spring. Masa transisi menyebabkan ketidakstabilan politik di berbagai

negara di Timur Tengah. Perang saudara terjadi dimana mana karena perebutan kekuasaan. Hal tersebut menjadi momentum bagi negara-negara besar untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan mendukung salah satu pihak. Disisi yang berlawanan juga berusaha mencari aliansi atau ingin dilindungi oleh negara tertentu sehingga hal tersebut menjadi ajang perang proksi (Munarji H, 2018).

Upaya penggulingan rezim Bashar Al-Assad di Suriah merupakan contoh bentuk perang proksi yang terjadi hingga saat ini. Dimana ada pemain dari luar yaitu Rusia dan Turki dalam konflik tersebut. Berdasarkan konsep perang proksi yang telah dijelaskan maka penulis akan menganalisis bagaimana bentuk perang proksi yang dilakukan oleh Rusia maupun Turki di Suriah.

2. Kompleks Keamanan Kawasan (Regional Security Complex)

Secara sederhana keamanan merupakan sebuah kondisi dimana tidak adanya ancaman, ketakutan, kecemasan, dan bahaya. Konsep keamanan dapat kita lihat dari dua perspektif yaitu melalui *Traditional security* dan *non traditional security*. *Traditional security* lebih dekat kaitannya dengan konsep realisme. Konsep ini menjadi konsep paling dominan yang berkembang di era perang dunia hingga perang dingin. *Traditional security* memaknai keamanan secara konvensional. Stephen M. Walt dalam (Sagena, 2013) mengatakan bahwa “Studi keamanan yaitu sebuah studi yang mempelajari tentang ancaman dan penggunaan militer sebagai aspek utama”. Dengan kata lain Walt mendefinisikan keamanan

terbatas pada fenomena perang dan juga berkaitan dengan isu-isu militer lainnya seperti *nuclear deterrence*, *military force*, dan *balance of power*. *Non traditional security*, yaitu sebuah pendekatan yang dapat dilihat dari perspektive konstruktivisme. Dimana konsep ini memandang keamanan secara lebih luas (Sagena, 2013).

Dewasa ini aktor konsep hubungan internasional menjadi lebih beragam sehingga definisi mengenai keamanan juga tidak hanya dapat dilihat dari aspek yang berkaitan dengan militer dan perang saja. Dalam fenomena hubungan internasional yang berkembang membuat munculnya aktor-aktor baru yang sangat berpengaruh seperti Multinational Corporation (MNC), Intergovernmental Organization (IGOs), kelompok - kelompok tertentu, dan aktor individu (Sagena, 2013). Masalah keamanan adalah hal yang paling krusial dalam sistem internasional yang anarki. Negara-negara yang memiliki hubungan kedekatan geografis, sejarah, dan budaya akan saling saling bergantung satu sama lain dalam hal keamanan. Hal tersebut dijelaskan dalam teori regional security complex yang selanjutnya akan disingkat RSC. Dimana keamanan suatu kawasan tertentu lebih bergantung pada negara-negara yang ada didalamnya (Barry Buzan O. W., 1998) .

Ketidakstabilan regional disebabkan oleh banyak hal seperti permusuhan etnis, sektarianisme, konflik agama, konflik politik, serta perebutan sumber daya alam. Persaingan politik dan perebutan sumber daya alam yang langka menjadi sumber konflik paling banyak terjadi dan

menjadi ancaman bagi stabilitas regional. Pemimpin yang otoriter, ketidakstabilan politik, dan adanya praktik nepotisme adalah faktor yang berpotensi menimbulkan konflik yang terbatas pada wilayah tertentu. Stabilitas keamanan regional sangat bergantung pada kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik. Dunia tidak akan pernah bebas dari konflik, namun hal tersebut dapat dihindari selama stabilitas politik dan kesejahteraan ekonomi terjaga. Setiap Negara memiliki kepentingan nasional yang bertujuan untuk memperoleh power demi kelangsungan hidupnya. Salah satu unsur kepentingan nasional yang paling rentan adalah keamanan (U.S. Department of State, 2022). Masalah keamanan secara regional dapat kita pahami apabila merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Barry Buzan. Konsep RSC diperkenalkan oleh Barry Buzan untuk memahami bahwa keamanan negara-negara disuatu kawasan bergantung pada pola interaksi negara-negara yang berada pada kawasan tersebut.

Barry Buzan mendefinisikan security complex “a group of states whose primary security concern link together sufficiently closely that their national security cannot realistically be considered apart from one another”. Berdasarkan pandangan Barry Buzan, konsep RSC terdiri dari pola interaksi aktor di dalam regional tertentu. Interaksi yang dimaksud yaitu apakah negara-negara saling bekerjasama atau saling bersaing. Hal tersebut berbanding lurus dengan kepentingan nasional negara. Selama mereka memiliki kepentingan bersama maka para aktor kan saling bekerjasama dan sebaliknya apabila memiliki kepentingan yang saling

bertentangan maka pola persaingan bahkan konflik akan terlihat. Pola interaksi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor bukan hanya adanya distribusi kekuasaan yang terjadi dalam suatu kawasan. Pola interaksi amity dan enmity terjadi sebagai akibat dari adanya konflik perbatasan, kepentingan, sektarianisme dan ideologi (Irawan, 2021).

Pola ini oleh (Barry Buzan O. W., 1998) disebut sebagai pola amity dan enmity. Pola ini dianalisis pada level regional dan faktor global dan domestik sebagai tambahan. Pola amity dan enmity dapat memberikan gambaran ditinjau dari interaksi antar negara apakah kearah yang sifatnya persahabatan dan kerjasama sehingga mengarah kepada terjadinya stabilitas regional ataukah interaksinya bersifat persaingan dan permusuhan yang menimbulkan eskalasi ketegangan sehingga memicu instabilitas keamanan regional. Menurut Buzan dan Waever (Jasuli, 2013) keamanan regional bergantung pada saling ketergantungan keamanan antar negara. Sejatinya aktor negara akan saling bekerjasama untuk mendapatkan keamanan secara regional. Namun adanya kepentingan nasional yang dikejar oleh masing-masing negara kadangkala menyebabkan perselisihan yang menyebabkan keamanan regional justru terganggu akibat dari permasalahan antar aktor negara di dalam suatu kawasan. Dalam artian ini teori RSC mengatakan bahwa kawasan adalah sub sistem hubungan antar negara yang ada karena adanya kedekatan unsur geografis, sejarah, dan budaya. Kedekatan tersebut membuat negara-negara ini bergabung dan tak dapat dipisah satu sama lain (Jasuli, 2013).

Struktur penting dari sebuah security complex terbentuk dari empat variabel

1. Boundary, yaitu mengacu pada batas-batas negara secara geografis.
2. Anarchic structure, dalam security kompleks ada dua atau lebih aktor yang terlibat. Mereka memiliki kekuasaan untuk mengatur dan menghidupi dirinya sendiri. Artinya, ada aktor-aktor tertentu yang memiliki untuk mengubah situasi tanpa ada campur tangan dari pihak lain.
3. Polarity, yaitu adanya kekuatan yang yang terdistribusi sehingga mempengaruhi struktur keamanan sebuah negara.
4. Social construction, yaitu security complex terbentuk atas pola interaksi aktor-aktor yang terlibat dalam suatu kawasan. Pola interaksi ini dapat berupa amity (Pertemanan) dan enmity (Permusuhan) (Ibrahim, 2018).

Dalam jurnal “Regional powers and security: A Framework for understanding order within regional security complexes”, K.J Holsti Menambahkan, Peranan suatu negara sebagai regional power dibagi menjadi tiga, yakni agressor, defender, dan balancer. Suatu negara berperan sebagai agressor apabila negara tersebut lebih memilih untuk mengesampingkan distribusi power yang merata dan memilih untuk menjadi aktor dominan di kawasan dengan meningkatkan powernya.

Sementara negara yang bersifat defender berupaya mempertahankan status quo, baik dalam bentuk interaksi berupa konflik maupun kerjasama. Sementara negara yang berperan sebagai balancer mengupayakan keseimbangan power antara negaranya dengan regional power lainnya supaya situasi *balance of power* dapat terjadi.

Kondisi Keamanan suatu kawasan dapat berubah apabila dipengaruhi oleh dua hal yaitu, pertama adanya transformasi internal yang berasal dari kawasan tersebut tanpa adanya campur tangan pihak diluar kawasan. Kedua, adanya aktor eksternal yang ikut campur dalam kawasan tersebut sehingga membuat keamanan regional berubah (Jasuli, 2013). Hal tersebut tercakup dalam empat level analisis sebagai berikut:

1. Stabilitas regional bergantung pada kondisi domestik negara-negara. Artinya, apabila terjadi ketidakstabilan domestik dalam sebuah negara maka dapat mempengaruhi keamanan negara lain yang berada dikawasan yang sama.
2. Keamanan regional terbentuk dari pola hubungan antar negara di kawasan tersebut.
3. Keamanan regional juga bergantung dari interaksi yang terjadi oleh suatu kawasan terhadap kawasan lain.
4. Keamanan kawasan dipengaruhi oleh kekuatan global yang punya peran dalam kawasan itu.

Keempat level analisis diatas akan penulis gunakan dalam menganalisis kondisi kawasan di Timur Tengah sejak perang proksi antara Rusia dan Turki terjadi apakah berpengaruh terhadap stabilitas kawasan tersebut atau tidak. Untuk analisis lebih lanjut penulis akan gunakan lima level analisis oleh Barry Buzan dan Ole Weaver dengan berdasarkan pada aktor-aktor yang terlibat yaitu:

1. International System, yaitu aktornya merupakan negara adidaya yang saling mempengaruhi secara global.
2. International Sub sistem, yaitu aktornya merupakan organisasi dan negara super power yang ada dikawasan.
3. Units, Yaitu aktor negara yang berinteraksi dalam sebuah kawasan.
4. Sub-Units, yaitu aktor-aktor dalam sebuah negara yang keberadaannya mempengaruhi perilaku sebuah negara.
5. Individual, Dalam hal ini aktor individu yang memiliki power dan peranannya sangat penting sehingga dapat mempengaruhi dinamika Keamanan yang terjadi. Aktor dalam hal ini seperti pejabat negara ataupun Jurnalis yang memberikan analisis dan justifikasi terhadap isu tertentu (Daniealdi, 2019).

Konsep RSC kemudian akan penulis gunakan dalam penelitian ini karena teori ini sangat relevan dalam kasus yang penulis sedang teliti. Penulis akan mengkaji Pengaruh perang proksi Rusia-Turki di Suriah terhadap stabilitas kawasan di Timur Tengah dengan menggunakan

beberapa metode analisis yang dipaparkan sebelumnya sehingga akan menghasilkan argumentasi penelitian yang akan penulis bahas di bab berikutnya.

3. Operasionalisasi Variabel

Dalam penelitian ini penulis membagi variabel kedalam dua jenis yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang tidak berdiri sendiri. Dalam penelitian ini merupakan variabel yang sifatnya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sedangkan variabel independen yaitu variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu stabilitas kawasan di Timur Tengah yang kemudian dipengaruhi oleh variabel independen dalam hal ini yaitu perang proksi Rusia dan Turki yang kemudian termanifestasi kedalam kebijakan luar negerinya. Berdasarkan uraian tersebut penulis akan menganalisis tentang bentuk perang proksi Rusia-Turki di Timur Tengah. Setelah itu peneliti akan menganalisis bagaimana pengaruh perang proksi yang terjadi terhadap stabilitas di Timur Tengah.

Tabel 1.1 Operasionalisasi Variabel

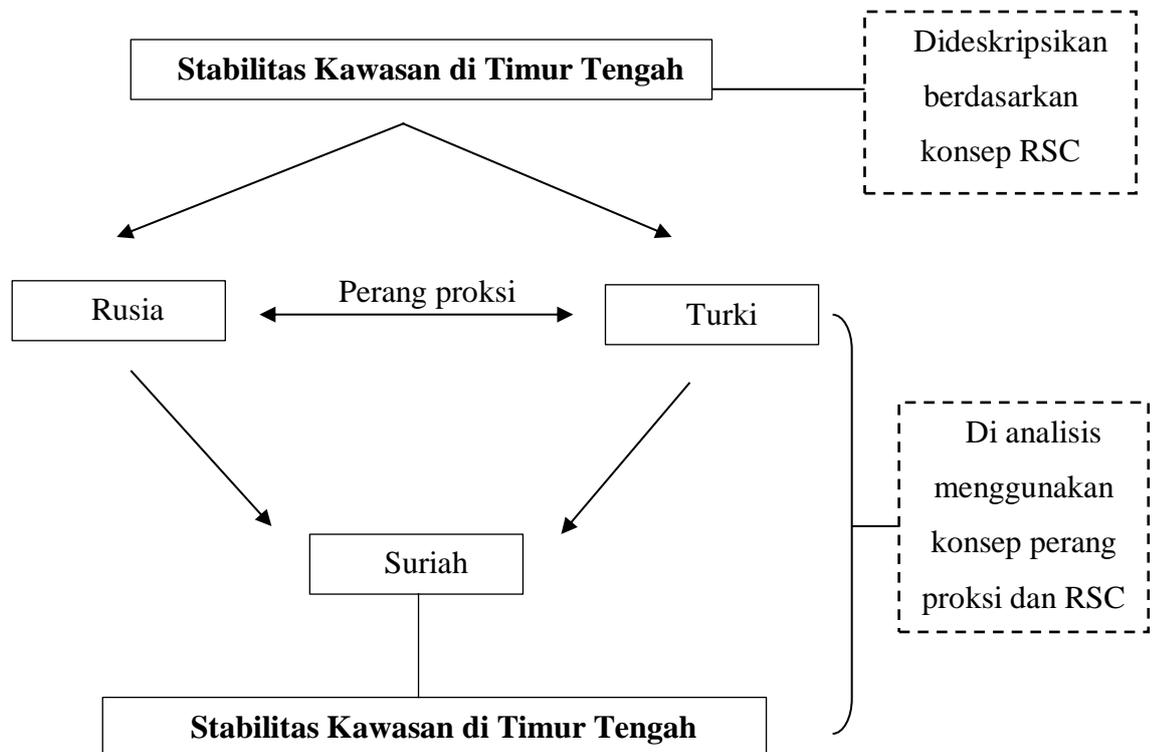
| Variabel Independen | Kategori Perang Proksi | Sub Kategori Perang Proksi | Indikator | Variabel Dependen | Kategori RSC | Indikator |
|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| | Hard power | Intervensi Militer | Jumlah pasukan | Stabilitas Kawasan | Kondisi domestik | Kondisi Domestik |

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------|---|-----------------|--|---|
| Perang proksi Rusia- Turki | | Bantuan Alutsista | Jenis dan jumlah alutsista | Timur Tengah | negara atau aktor | Negara Suriah |
| | | Pelatihan Militer | Bentuk pelatihan militer | | | |
| | | Bantuan Tentara Bayaran | Jumlah pasukan tentara bayaran | | | |
| | Soft power | Bantuan Finansial | Besaran dana yang diberikan | | Pola hubungan antar aktor dikawasan (amity atau enmity) | Pola hubungan antara Suriah dengan negara lain di Timur Tengah |
| | | Sanksi ekonomi | Bentuk dan mekanisme sanksi ekonomi | | | |
| | | Dukungan moral | Dukungan moral di forum internasional | | | |
| | | Kerjasama bilateral | Bentuk kerjasama | | | |
| | | | | | | Interaksi yang terjadi antar negara di Kawasan Timur Tengah |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|---|
| | | | | | dengan kawasan lain |
| | | | | Kekuatan global atau adanya distribusi kekuasaan yang besar | Masuknya negara adidaya ke dalam kawasan Timur Tengah |

4. Model Analisis

Bagan 1.1 Model Analisis



E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif dalam prosesnya tidak menggunakan data statistik ataupun prosedur hitungan lainnya. Penelitian ini berusaha memahami dan menginterpretasi suatu peristiwa atau suatu fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan naratif dalam menganalisis sebuah isu tertentu berdasarkan data dan fakta yang telah dikumpulkan. Metode ini penulis gunakan dalam menganalisis pengaruh perang proksi Rusia-Turki di Suriah terhadap stabilitas kawasan di Timur Tengah.

Dalam penelitian ini penulis melihat fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan kemudian mengumpulkan data-data yang konkret. Setelah itu penulis akan melihat apakah perang proksi Rusia - Turki di Suriah penyebab timbulnya perang berkepanjangan dan instabilitas kawasan di Timur Tengah. Penelitian ini merupakan tipe generalisasi dimana hubungan dua konsep yang berbeda kemudian menghasilkan suatu kesimpulan. Lalu kesimpulan tersebut bisa kita gunakan untuk fenomena-fenomena serupa dengan kondisi yang sama.

2. Jenis Data

Dengan menggunakan teknik studi pustaka yaitu dengan menelaah, membaca dan memahami buku, teori, opini dan jurnal yang terkait dengan tema penelitian, serta data-data pendukung dari media internet maupun

media cetak. Dengan teknik studi kepustakaan peneliti dapat mengumpulkan data sekunder yaitu dengan studi kepustakaan terkait perang proksi Rusia-Turki di Suriah dan pengaruhnya terhadap stabilitas Timur Tengah selama konflik berlangsung.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap ini penulis berusaha mencari dan mengumpulkan data-data dan referensi terkait perang proksi yang terjadi antara Rusia dan Turki. Kemudian penulis juga akan mencari tahu tentang bagaimana perang proksi tersebut memiliki pengaruh atau tidak terhadap instabilitas kawasan di Timur Tengah menggunakan konsep RSC. Karena penelitian ini menggunakan metode Library Research maka dalam mengumpulkan sumber-sumber data peneliti berusaha mencari jurnal, laporan penelitian, buku, surat kabar, Artikel, dan sumber-sumber lainnya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam tahap ini penulis berusaha menganalisis data-data yang telah diperoleh terkait dengan topik yang diteliti. Penulis akan menganalisis bentuk proksi oleh kedua negara Rusia-Turki berdasarkan kebijakan luar negerinya. Setelah itu dalam melihat pengaruhnya terhadap stabilitas kawasan, berdasarkan teori RSC maka penulis akan menggunakan empat level analisis berdasarkan tingkatannya yaitu level domestik, level negara, level regional, dan level global. Pertanyaan penelitian bisa terjawab pada level negara. Namun, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal maka

penulis akan melanjutkan analisis hingga level global untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan yang lebih akurat.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bagian yaitu:

BAB I: Berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, metode penelitian dan Konsep yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti.

BAB II: Bab ini berisikan uraian lebih jauh terkait konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan tinjauan pustaka dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis sedang teliti saat ini.

BAB III: Dalam bagian ini penulis akan menguraikan kondisi umum di Timur Tengah dan kondisi Suriah serta penulis akan menggunakan konsep RSC dalam menganalisis kondisi di Timur Tengah saat itu.

BAB IV: Dalam bab ini Penulis akan menguraikan tentang bagaimana bentuk perang proksi Rusia-Turki dan pengaruhnya terhadap stabilitas Kawasan di Timur Tengah dengan menggunakan empat level analisis berdasarkan konsep RSC.

BAB V: Dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari penelitian berdasarkan hasil analisis yang dibangun dengan berlandaskan data dan fakta yang ditemukan.

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka yang didapat dari berbagai sumber untuk memperdalam penjelasan mengenai kerangka konsep yang digunakan dalam penelitian. Pembahasan mengenai kerangka konsep pada bab sebelumnya akan dijelaskan secara lebih luas, selain itu bab ini berisikan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis sebagai dasar acuan dalam meneliti.

A. Perang Proksi

Perang proksi atau biasa dikenal dengan *proxy war* merupakan sebuah perang yang melibatkan dua *major power* dengan memanfaatkan pihak lain untuk berperang (Yulivan, 2019). Lebih tepatnya perang proksi merupakan keterlibatan secara tidak langsung negara atau aktor lain di dalam sebuah konflik dengan maksud ingin mempengaruhi hasil konflik tersebut agar sejalan dengan kepentingan nasionalnya. Keterlibatan tersebut dapat dilihat dari adanya relasi yang cukup signifikan antara mereka dengan agen proksinya. Hal itu dibuktikan dengan penyaluran bantuan baik itu dalam bentuk *hard power* maupun *soft power* (Mumford, 2013). Untuk bisa dianggap sebagai sebuah perang proksi, sebuah pihak yang berkonflik harus memiliki hubungan langsung yang sifatnya jangka panjang dengan aktor lain. Hubungan ini bisa berbentuk pendanaan, pelatihan militer, penyediaan senjata, serta bentuk dukungan lainnya yang dibutuhkan untuk membantu upaya dalam memenangkan perang (Kemenhan RI, 2020)

Sejarah perkembangan perang proksi tidak terlepas dari periode sejarah perang dunia pertama dan kedua dan berakhir dengan perang dingin (cold war). Dalam Perang Dingin, perang proksi menjadi metode yang digunakan baik oleh Amerika Serikat maupun Uni Soviet untuk menyebarluaskan pengaruh dan menjalankan kepentingan masing-masing tanpa harus mengalami benturan secara langsung. (Kemenhan RI, 2020). Istilah perang proksi mulai muncul selama perang dingin yang berlangsung antara akhir perang dunia tahun 1945 hingga runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, poros politik dunia terpecah menjadi dua kekuatan utama: Amerika Serikat di satu sisi dengan negara-negara kapitalis liberal dan Uni Soviet (kemudian Rusia) dengan negara-negara sosialis-komunis. Hal ini melahirkan contoh hubungan dua arah. Beberapa negara yang tergabung dalam dua sumbu ini saling berebut hegemoni kekuatan dunia. Dalam perang antara kedua kubu, tidak hanya kekuatan militer dan intelijen yang digunakan, tetapi juga kekuatan sipil yang bertindak sebagai propaganda ideologis. Perang proksi bisa disebut sebagai perang multidimensi, serangan yang dilakukan oleh satu faksi terhadap faksi lainnya bukanlah hanya serangan militer, melainkan serangan politik, ideologi, ilmu pengetahuan dan budaya (Yulivan, 2019).

Perang dingin sebenarnya bukanlah sebuah konflik terbuka antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, melainkan perselisihan antara aktor yang dikenal sebagai “boneka” dari kedua negara . Hal ini selanjutnya disebut

sebagai perang proksi yang menjadi penyebab beberapa konflik antara negara boneka dari dua kubu perang (Yulivan, 2019). Negara-negara besar yang terlibat pada perang dunia pertama dan kedua setelah itu tidak lagi ingin mengambil resiko yang lebih besar. Ada beberapa alasan utama mengapa konsep perang proksi digunakan oleh negara-negara dalam perpolitikan global (Rofii, 2022).

Pertama, perang secara konfrontasi langsung menimbulkan banyak kerugian baik dari segi ekonomi maupun banyaknya korban jiwa. Konsep perang proksi kendati digunakan oleh negara-negara yang memiliki power yang kuat dalam mencapai kepentingan nasionalnya karena minimnya risiko yang akan diterima. Salah satu contohnya yaitu perang proksi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet di era perang dingin. Mereka menghindari untuk saling menyerang secara langsung karena sangat berbahaya kendati keduanya memiliki power yang besar dan juga senjata berbahaya termasuk senjata nuklir. Negara-negara tersebut lebih memilih untuk menggunakan perang “proxy” yaitu dengan menggunakan negara lain untuk mencapai kepentingannya. Kedua, yaitu adanya security dilemma yang dirasakan oleh sebuah negara atas dominasi dari negara yang menjadi rivalnya. Salah satu cara untuk mencegah dan membendung dominasi tersebut yaitu mendukung sebuah negara atau kelompok tertentu yang juga bermusuhan dengan negara rival (Rofii, 2022).

Ketiga yaitu untuk menjaga dan membangun citra negara di kancah internasional. Beberapa negara tidak ingin terlibat langsung dalam

perang dan konflik yang terjadi. Hal tersebut dilakukan agar negara tidak mendapat kecaman dari negara lain. Selain itu juga demi menjaga stabilitas politik domestik dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Praktik ini banyak dilakukan oleh negara penganut demokrasi. Selain itu jika dianalisis ke level individu. Pemimpin sebuah negara juga berusaha untuk mendapat dukungan politik dari masyarakat dan memperbaiki citranya agar tidak dilengserkan. Keempat dari segi biaya, umumnya perang proksi tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar dan juga tidak perlu menurunkan militernya secara besar-besaran. Perang proksi dianggap lebih hemat biaya dibanding dengan perang secara langsung. Hanya dengan memanfaatkan negara lain kepentingan nasional suatu negara bisa tercapai. Itulah alasan mengapa langkah perang proksi lebih efisien dan banyak dipraktikkan oleh negara-negara besar (Rofii, 2022).

Perang proksi seringkali menjadi sebuah kebijakan yang dirahasiakan oleh suatu negara yang menjadi pemain. Karena sifatnya yang rahasia tidak menutup kemungkinan bahwa sebuah negara memilimi kepentingan khusus dalam sebuah konflik yang terjadi di negara tertentu maupun di tingkat regional. Demi tercapainya kepentingan nasional dan kemajuan negaranya beberapa aktor negara bahkan tidak segan-segan mengorbankan negara lain. Maka dari itulah terkadang aktor negara tidak memperdulikan perjanjian maupun norma-norma yang berlaku secara internasional. Sebuah negara tidak segan memberi bantuan dan suntikan

dana terhadap pihak ketiga. Dengan itu mereka bisa mengendalikan aktor tersebut sesuai keinginannya (Munarji, 2016).

Intinya, perang proksi merupakan alternatif paling logis dan menguntungkan bagi sebuah negara yang berusaha mencapai kepentingan nasionalnya. Perang ini didefinisikan sebagai perang dimana ada aktor utama (aktor proksi) dan ada aktor yang menjadi agennya. Baik negara maju yang memiliki power yang kuat maupun negara berkembang bisa saja terlibat dalam perang jenis ini. Biasanya negara maju yang akan menjadi aktor utama perang proksi dan negara berkembang yang menjadi agennya atau pemain yang terjun ke arena konflik. Korban jiwa yang gugur dalam perang ini akan banyak dari negara-negara agen yang berperang secara langsung dibanding negara yang melakukan proksi (Mustofa, 2021).

Perang proksi adalah strategi paling jitu yang digunakan negara-negara super power yang saling bersaing. Yaacov Barsimantov dalam (Rofii, 2022) juga mengatakan perang proksi sebagai perang antar negara yang terjadi dalam sebuah kawasan sebagai pengganti konfrontasi langsung negara-negara besar. Menurut Jon B. Alterman, seorang peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengatakan bahwa konflik yang terjadi di Suriah pasca Arab spring merupakan sebuah perang proksi yang melibatkan banyak aktor baik aktor negara maupun non-negara (Rofii, 2022). Perang proksi terbukti menjadi bentuk perang paling rasional karena memberikan keuntungan yang maksimal dengan resiko

yang minim. Singkatnya negara melakukan perang proksi untuk mencapai kepentingan strategis mereka dengan menghindari biaya perang yang mahal dan pertumpahan darah dari pihaknya (Mumford, 2013). Sangatlah sulit untuk melihat siapa kawan dan siapa lawan dalam perang proksi karena aktor yang terlibat perang disebuah wilayah terkadang sebenarnya saling bekerjasama satu sama lain disektor sektor tertentu (Yulivan, 2019).

Para aktor eksternal yang terlibat pada umumnya berusaha mencari keuntungan dalam konflik dan kebanyakan dari mereka cenderung menolak untuk bernegosiasi. Mereka lebih mementingkan kepentingannya sendiri dibanding berusaha mencari solusi bersama untuk perdamaian. Hal ini yang membuat keterlibatan mereka dapat dianggap sebagai penambahan aktor didalam konflik. Semakin bertambahnya aktor maka kepentingan didalam perang juga akan banyak sehingga durasi perang yang akan terjadi akan lebih lama. Selain itu upaya resolusi konflik terhambat karena sangat sulit mencari jalan tengah dari banyak kepentingan (Arifin, 2019).

Pada intinya, dalam studi militer dan keamanan, serta hubungan global secara lebih luas, mendefinisikan perang proksi sebagai konfrontasi yang terjadi di dalam sebuah negara yang mencakup unsur-unsur aktor negara dan non-negara. Jenis perang ini melibatkan unit dengan kepentingan yang berbeda-beda. Baik secara langsung ataupun tidak

langsung, baik aktor negara maupun non-negara yang memiliki kepentingan. Tidak seperti perang konvensional, tidak semua pihak yang terlibat dalam perang proksi menggunakan kekuatan militer. Asosiasi mereka bisa saja berupa memberikan pandangan politis, pengiriman senjata, dan kontribusi untuk pemikiran ideologis yang mungkin terlihat seperti ancaman domestik dalam cakupan yang lebih besar (Yulivan, 2019).

Perang proksi melibatkan lebih banyak negara eksternal dengan kepentingan yang tidak diketahui tetapi terselubung. Oleh karena itu, konflik kepentingan dapat menyebabkan konflik yang tidak terduga dan berkelanjutan, salah satu contohnya yang terjadi di Suriah. Latar belakang sejarah negara-negara asing yang berpartisipasi disertai dengan rasa identitas nasional dan elemen penting dalam pemanfaatan sumber daya alam dari negara-negara yang terkena dampak berbagai konflik yang kompleks (Yulivan, 2019). Hubungan langsung jangka panjang yang intensif menjadi indikator untuk menilai apakah ada keterlibatan proksi antara faksi-faksi bersenjata yang bertikai di dalam negeri dan sekutu asing mereka dan apakah aktor negara terlibat atau menganggarkan biaya operasi perang, memenuhi kebutuhan senjata kelompok-kelompok domestik tersebut, pelatihan militer dan berbagai bentuk dukungan material lainnya.

Oleh karena itu, kelompok perang yang didukung mampu mengobarkan perang dalam jangka waktu yang lama, dan berpeluang

besar berhasil memenangkan berbagai bentuk operasi militer, pertempuran, dan perang melawan musuh, pemerintah yang sah, atau kelompok pemberontak. Selanjutnya, dalam perang proksi, kontribusi dan dukungan negara asing kepada kelompok-kelompok yang bertikai dalam satu negara dapat menimbulkan konflik baru yang sulit untuk didamaikan. Hal ini karena kelompok militan yang mereka dukung di negara atau wilayah tersebut melayani kepentingan negara asing sebagai pihak ketiga, meskipun tidak secara langsung (Yulivan, 2019).

Sebuah aktor yang memainkan proksi akan membiayai semua kebutuhan yang diperlukan oleh aktor proksinya dengan imbalan mereka mau melakukan segala sesuatu yang diinginkan pemberi bantuan untuk memecah belah kekuatan musuh. Motif perang proksi yang dilakukan oleh negara-negara besar dalam beberapa kasus adalah: a. Kekuasaan atas politik dan isu keamanan (*security*). b. Ekonomi baik menggunakan *hard power* dan *soft power*. Pada masa perang dingin yang penuh dengan nuansa perang, *self-help*, dan *survival* maka masing-masing negara mementingkan isu keamanan (*security*). Kepentingan keamanan sekaligus juga kepentingan politik sehingga proksi yang dilakukan berkaitan dengan dua isu tersebut (*high politics*) (Kemenhan RI, 2020).

Dalam beberapa kasus, perang proksi dilakukan untuk membantu oposisi mengganti rezim yang berkuasa seperti yang terjadi pada fenomena Arab spring yang pada akhirnya membantu negara-negara besar dalam memperoleh hegemoni di panggung politik internasional baik dalam

kerangka kekuasaan (power) maupun pengaruh (influence). Perang proksi dilakukan dengan menggunakan kelompok-kelompok lokal suatu negara yang berasal dari aktor negara maupun non-negara. Pola konflik bersenjata saat ini mengalami perubahan yang signifikan sehingga memengaruhi kecenderungan bentuk konflik kontemporer di dunia. Hal ini disebabkan adanya perkembangan teknologi militer, keinginan untuk mengurangi jatuhnya korban, biaya perang yang tinggi dan semakin ketat penerapan kaidah-kaidah hukum dan konvensi internasional. Pola untuk menguasai ruang tidak lagi dilakukan secara frontal, melainkan dilakukan dengan cara-cara nonlinier, tidak langsung, dan bersifat Proxy War (Kemenhan RI, 2020).

B. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah salah satu aspek penting dalam menentukan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan luar negeri suatu negara selalu berbanding lurus dengan kepentingan nasionalnya, karena hal itulah yang akan mereka capai (Dermawan, 2019). Kepentingan nasional erat kaitannya dengan konsep realisme. Konsep realisme sendiri beranggapan bahwa dalam politik internasional sikap suatu negara direfleksikan sebagaimana perilaku manusia yang agresif dan egois. Sifat agresif dan egois tersebut tak lain sebagai bentuk pertahanan diri atas ancaman dari dunia luar serta ancaman atas kelangsungan hidupnya.

Dalam politik dan kebijakan luar negeri suatu negara didasarkan atas bagaimana ia memenuhi kebutuhannya yang akan didapat dengan berbagai

cara bahkan kekerasan. Realisme memandang bahwa keberlangsungan hidup dan kepentingan nasional negara lebih penting daripada *moral value*, etika, dan juga norma-norma internasional yang berlaku dalam sebuah entitas. Negara akan melakukan *struggle of power* atas hal tersebut (Assilmy, 2021).

Negara merupakan satu kesatuan aktor yang bertindak berdasarkan kepentingan nasionalnya. Dalam pengambilan sebuah kebijakan harus secara rasional. Rasional yang dimaksud yaitu sejalan dengan kepentingan nasionalnya tanpa bisa diganggu gugat. Tindakan yang dapat melemahkan kekuasaan negara dianggap sebagai sebuah kebijakan yang tidak rasional. Realisme menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki ketegasan dalam bertindak. Artinya dalam sebuah politik internasional yang bersifat kompetitif negara tidak boleh menunjukkan sikap yang mudah terpengaruh oleh keinginan negara lain sehingga mengarahkan negara untuk hidup dalam lingkup yang anarki. Kondisi demikian membuat negara harus mengandalkan dirinya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya institusi internasional yang memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur dan memberikan sanksi kepada sebuah negara. Tanpa adanya hierarki yang dapat mengontrol tingkah laku sebuah negara, dalam prinsip realisme berlaku hukum alam bahwasanya yang kuat yang akan terus hidup (Assilmy, 2021).

Kepentingan nasional menurut K.J Holsti terbagi menjadi tiga jenis yaitu *core value*, *middle range objective*, dan *long range objective*. *Core*

value adalah bagaimana usaha sebuah Negara untuk memastikan eksistensinya sehingga tidak ada kompromi atas hal itu. Kemanan nasional dan juga ekonomi adalah dua hal yang paling terkait. Berikutnya yaitu *middle range objective*, yaitu upaya suatu Negara dalam hal memperkuat posisinya dalam politik internasional. dan yang terakhir adalah *long range objective* adalah usaha sebuah Negara dalam mewujudkan cita-citanya dalam politik internasional maupun domestik (Assilmy, 2021).

Di dunia ini terdapat banyak negara yang memiliki kepentingan masing-masing. Negara - negara saling bersaing dan terkadang berperang untuk mencapai kepentingan itu. Suatu negara akan saling bekerja sama selama mereka memiliki kepentingan bersama. Namun Ketika mereka memiliki kepentingan yang saling bertentangan tak jarang konflik hingga peperangan terjadi. Ketika hal tersebut terjadi maka sebuah negara akan merasa terancam sehingga akan melindungi dirinya dengan berbagai cara. Konsep kepentingan nasional merupakan substansi politik yang bersifat abadi dan tak akan berubah selama kehidupan didunia ini diorganisasikan kedalam berbagai negara yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda. Meskipun kepentingan nasional adalah hal yang mutlak dan abadi namun ada banyak variable yang mempengaruhi dan mendasarinya.

Menurut Donald E. Nuechterlein, Pada dasarnya kepentingan nasional dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Kepentingan Pertahanan (*defence interest*) yaitu berupa upaya negara untuk mempertahankan dan melindungi negara beserta warga negaranya dari ancaman apapun.
2. Kepentingan ekonomi (*economic interest*) yaitu upaya negara dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomiannya dalam berhubungan dengan negara lain.
3. Kepentingan sistem dunia (*world order interest*) yaitu bagaimana suatu negara berupaya mempertahankan dan menjaga agar system politik dan perekonomian dunia tetap sesuai dengan kemauannya sehingga dalam menjalankan perdagangan antar negara tetap aman.
4. Kepentingan ideologis (*ideological interest*) yaitu upaya suatu negara dalam menjaga ideologinya ataupun menyebarkan ideologi yang menurutnya baik bagi seluruh dunia (Suwarman, 2018)

Hans Morgenthau berpandangan bahwa kepentingan nasional negara adalah hal yang paling utama dalam politik internasional. Morgenthau percaya bahwa kepentingan negara jauh lebih utama dibanding norma, nilai dan moralitas. Berbeda dengan pandangan kaum idealis, yang berharap bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan cara yang baik, bermoral, dan damai, Morgenthau menekankan bahwa moralitas hanya melemahkan negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Norma dan nilai moralitas berisi aturan-aturan yang sifatnya membatasi kekuasaan negara sebagai aktor utama dalam hubungan

internasional. Dalam artian ini Morgenthau berpandangan bahwa dalam mengejar kepentingan nasional negara harus bersifat amoral, artinya tidak tunduk pada apapun (Sandrina Antunnes, 2018)

Kepentingan nasional adalah hal yang sangatlah penting bagi negara dalam merumuskan kebijakan dan politik luar negerinya. Setiap negara selalu berusaha memenuhi kepentingan nasionalnya dalam politik internasional sehingga negara melakukan *struggle of power* dalam prosesnya. *Power* merupakan instrumen penting dalam hubungan internasional. Tanpa *power* yang cukup sebuah negara akan sangat sulit untuk memenuhi keinginannya. Maka dari itu terkadang negara membutuhkan kerjasama dari negara lain. untuk memperoleh *power* tersebut. Suatu negara selalu membenarkan diri atas tindakannya dalam mencapai kepentingan nasionalnya terlepas dari tuntutan norma internasional yang berlaku. Karena dalam konsep realisme negara adalah aktor utama yang bebas dan hidup dalam lingkup yang anarki dimana kepentingan nasional dan keamanan negara adalah hal yang paling utama diatas segalanya. Kepentingan nasional juga dapat dikatakan sebagai tuntutan, tujuan, dan cita-cita sebuah negara yang harus dilindungi, diamankan, dan dipelihara dalam hubungannya dengan bangsa lain.

Kepentingan nasional dapat diklasifikasikan kedalam dua jenis yaitu kepentingan vital dan *non-vital*. Kepentingan vital menurut Morgenthau adalah yang terkait dengan identitas dan keberlangsungan hidup sebuah negara. Identitas yang dimaksud dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu

identitas fisik yang meliputi teritorial, sistem politik, ekonomi, dan budaya sebuah negara. Identitas semacam ini sangat memiliki nilai yang dijunjung tinggi oleh negara karena merupakan substansi dari negara itu sendiri. Bahkan sebuah negara rela berperang mati-matian dalam mempertahankan hal tersebut (Dinesh, 2022). Selanjutnya yaitu kepentingan *non-vital*, yaitu kepentingan nasional yang juga cukup penting bagi sebuah negara untuk karena secara tidak langsung dapat mendukung keberlangsungan hidupnya. Kepentingan *non-vital* prosesnya cukup lama dan manfaatnya juga dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama. Contoh Kepentingan nasional *non-vital* diantaranya opini publik dan nilai moral. Hal ini juga penting untuk menjaga citra negara di panggung internasional (Pajriansyah, 2020) .

Dalam Mencapai mencapai kepentingan nasionalnya negara akan menggunakan cara atau metode-metode tertentu diantaranya:

1. Diplomasi

Diplomasi merupakan cara untuk mencapai kepentingan nasional yang paling utama dan diterima oleh seluruh negara didunia dan merupakan cara yang paling efektif. Diplomasi melibatkan dua aktor atau lebih. Tujuan yaitu untuk mengadakan dialog tawar menawar antara aktor A dan Aktor B melalui pertemuan yang diwakili oleh seorang diplomat. Untuk mencapai kepentingan nasional, diplomasi merupakan jalan yang paling aman dan diterima secara

universal. Hans Morgenthau menganggap bahwa diplomasi adalah cara yang paling utama. Akan tetapi diplomasi tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai keinginan sebuah negara sehingga kadang suatu negara harus menggunakan metode lain. Diplomasi terbagi dua yaitu, *Soft Diplomacy* merupakan bentuk diplomasi dengan menggunakan jalan damai, seperti melalui ekonomi, kebudayaan, teknologi, dan lain-lain dan *Hard Diplomacy*, Yaitu Diplomasi dengan menggunakan kekerasan dan jalan perang.

2. Propaganda

Metode penting kedua dalam mencapai kepentingan nasional adalah dengan melakukan propaganda. Propaganda adalah cara suatu negara untuk mencapai kepentingan pribadinya dengan berusaha meyakinkan orang lain tentang sebuah tujuan yang ingin dicapai. Upaya propaganda bersifat sistematis yang berusaha mempengaruhi perasaan, pikiran, dan tindakan suatu kelompok tertentu. Propaganda seringkali dilakukan pada rakyat negara lain untuk percaya bahwa tindakan yang akan dilakukan sebuah negara propagandis itu memiliki tujuan yang baik padahal sebenarnya hanya untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Di era yang modern ini propaganda sangat mudah dilakukan dengan menggunakan sarana internet untuk mencari dukungan terhadap tujuan-tujuan kepentingan nasional.

3. Sarana Ekonomi

Dalam dunia internasional terdapat negara kaya dan miskin. Adanya kesenjangan antara negara kaya dan miskin membuat negara-negara tersebut saling ketergantungan. Negara miskin seringkali membutuhkan negara kaya dan maju untuk bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Begitupun negara kaya menggunakan bantuan ekonomi tersebut untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Di era globalisasi ini, peran hubungan ekonomi dalam hubungan internasional semakin utama dalam mengamankan kepentingan nasional. Bagaimana pun juga instrumen ekonomi menjadi hal yang vital bagi sebuah negara. Negara yang ekonominya lemah akan mengalami instabilitas politik. Dapat dikatakan bahwa negara akan hancur apabila ekonominya lemah. Untuk itu bantuan ekonomi sangat penting dalam mencapai kepentingan nasional.

4. Aliansi dan Perjanjian

Aliansi merupakan kesepakatan dua negara atau lebih untuk bekerjasama dalam mengamankan kepentingan nasional mereka. Namun terkadang juga negara-negara saling bekerjasama disebabkan oleh ancaman yang sama. Oleh karenanya mereka beraliansi untuk melawan musuh bersama.

5. Cara Paksaan

Power dalam hubungan internasional merupakan instrumen yang sangat penting dalam mencapai kepentingan nasional. Tingkat keberhasilan sebuah negara dalam mencapai kepentingannya

berbanding lurus dengan besarnya power yang dimilikinya. Dalam dunia internasional dapat diakui bahwa cara-cara yang sifatnya koersif dapat digunakan oleh negara dalam keadaan tertentu untuk mencapai tujuannya. intervensi, embargo, boikot, dan pembalasan adalah metode yang paling sering digunakan. Cara tersebut dapat digunakan oleh negara untuk memaksa negara lain agar menahan diri atas tindakan yang ingin dilakukan. Semua cara tersebut digunakan oleh negara jika memang diperlukan. Dalam politik internasional cara paksaan adalah hal yang biasa dilakukan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya. Dalam pandangan realisme negara memiliki kebebasan untuk mengamankan kepentingan nasionalnya dengan cara apapun termasuk dengan cara-cara koersif selama itu dianggap efektif (Dinesh, 2022).

Kepentingan nasional adalah tujuan sebuah negara yang terdiri atas unsur keamanan, ekonomi, dan budaya. Konsep ini sangat penting dalam menjelaskan perilaku negara dalam hubungan internasional. Dalam hal ini, Niccolò Machiavelli berfokus pada bagaimana karakteristik dasar manusia mempengaruhi keamanan suatu negara. dan menurutnya gender mempengaruhi pandangan politik seseorang. Dimana laki-laki dianggap lebih realistis dibanding perempuan yang pemikirannya seringkali dipengaruhi oleh perasaan mereka yang lembut. Machiavelli berpendapat bahwa tugas utama seorang pemimpin yaitu menjamin keamanan negara. Untuk itu seorang pemimpin harus waspada terhadap ancaman baik itu

dari eksternal maupun internal negara. Pandangan Machiavelli menyebutkan bahwa pemimpin bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan hidup negara. (Sandrina Antunnes, 2018).

Machiavelli mengatakan bahwa perilaku suatu negara dalam hubungan internasional adalah berdasarkan kepentingan nasionalnya. Dalam mengejar kepentingan itu negara menggunakan cara kerjasama maupun cara paksaan jika memang perlu. Dalam pandangan realisme negara merupakan aktor utama yang hidup dalam dunia yang anarki. Negara sebagai aktor utama cenderung menempatkan kepentingan nasional di atas moralitas dan norma-norma internasional (Arry Bainus, 2018).

Tanpa peduli terhadap moralitas dan aturan agama, dalam pandangannya yang realis keamanan negara jauh yang lebih utama. Jika negara perlu melakukan tindakan kekerasan selama itu dapat mengancam keberlangsungan negara maka tidak dapat dipungkiri hal tersebut dilakukan. Kepentingan nasional merupakan rangkaian dari kebutuhan fundamental suatu negara dilihat dari kondisinya. Kebutuhan tersebut tergantung dari kondisi politik, militer, dan sosial budayanya. Kepentingan nasional bertujuan untuk mengejar *power*.

Kita dapat menganalisa kepentingan nasional sebuah negara berdasarkan kebijakan dan politik luar negeri yang diambil. Konsep kepentingan nasional menekankan peran aktor negara untuk harus

mengejar *power* dengan cara apapun baik itu dengan cara kerjasama maupun paksaan. Hal ini demi menjamin kepastian kelangsungan hidupnya sehingga terhindar dari kehancuran dan intervensi dari negara lain. Dalam konsep hubungan internasional *power* dan kepentingan nasional memiliki hubungan timbal balik baik itu sebagai instrumen maupun sebagai tujuan yang ingin dicapai (Pajriansyah, 2020) .

Perlu kita pahami bahwa konsep kepentingan nasional merupakan hal mendasar bagi sebuah negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Konsep inilah yang menjadi faktor penentu bagaimana sebuah negara akan berperilaku dalam lingkup internasional. Realisme berpandangan Bahwa kepentingan nasional adalah hal yang harus dikejar sebagai upaya dalam memperoleh *power*. Dimana *power* merupakan faktor penentu seberapa besar kontrol negara terhadap negara lain atau seberapa besar pengaruh yang suatu negara dalam sebuah entitas. Kemudian *power* digunakan dalam mencapai kepentingan nasional lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa ada hubungan timbal balik antara mengejar kepentingan nasional untuk memperoleh *power* dan memperoleh *power* untuk mengejar kepentingan nasional. Dalam hubungan internasional negara dapat menggunakan metode Kerjasama maupun metode yang sifatnya koersif. *Power* (kekuasaan) dan kepentingan nasional adalah instrumen penting yang tidak dapat dipisahkan dalam hubungan internasional. Karena dengan sarana itulah negara akan bertahan hidup dalam lingkup internasional yang anarki (Pajriansyah, 2020) .

C. Kompleks Keamanan Kawasan (*Regional Security Complex*)

Dalam mempertahankan keamanan nasional, Negara memiliki strategi seperti melalui diplomasi maupun militer dan intelijen yang kuat. Diplomasi yang dilakukan oleh negara salah satunya bertujuan untuk mencari aliansi dan menjalin hubungan baik dengan negara lain. Hal tersebut berkontribusi besar bagi keamanan. Memahami fenomena terkait isu keamanan sangat penting bagi sebuah negara. masalah politik yang berkepanjangan, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, krisis ekonomi, memicu masalah keamanan lainnya seperti munculnya berbagai aktor ekstremisme dan juga aktor lain yang berasal dari luar nasional (US Department, 2022)

Pendekatan RSC melihat bahwa keamanan hadir sebagai hasil sebagai konstruksi sosial karena dibentuk oleh pola interaksi aktor lokal kawasan. RSC tidak hanya berperan terhadap aktor didalamnya saja. RSC menjadi penentu apakah kekuatan eksternal yang lebih kuat dapat menembus wilayah tersebut. saling ketergantungan muncul dari rasa takut, persaingan, dan persepsi bersama tentang ancaman. maka dari itu Negara-negara kawasan akan saling bekerjasama untuk mengatasi ancaman tersebut.

Namun dewasa ini regionalisme muncul sebagai bagian dari kesepakatan bersama. Negara-negara membuat sebuah badan khusus dan membuat aturan perjanjian untuk mengurangi *security dilemma*. Badan keamanan tersebut membuat negara tidak lagi saling bermusuhan dan

tergabung kedalam aktor tunggal regional yang lebih besar dalam sistem internasional. Namun dalam dunia yang anarki negara masih memperlakukan satu sama lain sebagai rival dan ancaman yang paling potensial (Barry Buzan O. W., Security: a new framework for analysis, 1998).

Dunia Internasional yang anarki, gejolak yang terjadi dalam internal suatu negara tidak hanya mengancam keamanan negara itu. Akan tetapi memiliki potensi ancaman terhadap negara-negara tetangganya dan begitupun terhadap keamanan regional maupun keamanan global. Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah selalu memiliki tensi untuk melebar secara lebih luas karena struktural keamanan tercipta oleh interaksi antar negara sehingga keamanannya saling mempengaruhi dan saling bergantung. Dalam level analisis kita bisa mulai dari level domestik dimana keamanan nasional suatu negara bisa berdampak pada keamanan regional hingga keamanan global. Begitupun sebaliknya keamanan global juga akan berdampak pada keamanan nasional suatu negara.

Dinamika keamanan dalam suatu kawasan merupakan satu sistem struktural tertentu yang berbeda-beda tergantung pada pola interaksi yang terjadi dan juga isu yang berkembang didalamnya. Tidak hanya pada lingkup batas-batas geografis saja namun juga bergantung pada konfigurasi sosial yang membentuknya. Sebagai contoh adalah negara Israel. Meskipun Israel berada di kawasan yang sama, Namun Israel memiliki imunitas terhadap isu yang terjadi di Timur Tengah. Begitupun

Indonesia dan beberapa negara di Afrika. Walaupun secara geografis jaraknya jauh dari Timur Tengah yang sedang bergejolak namun dampaknya bisa dirasakan karena berada pada struktur sosial yang sama (Daniealdi, 2019). Pasca perang dingin sistem internasional telah membagi wilayah-wilayah di dunia kedalam dua jenis yaitu wilayah damai dan wilayah konflik. Begitupun dengan perkembangan yang terjadi membuat Multisektoral konsep keamanan, keberagaman aktor, dan serangkaian kondisi dan dinamika sangat berbeda di satu kawasan dengan yang lainnya (Barry Buzan O. W., 2003).

Regional security complex juga dipengaruhi oleh kekuatan yang berasal dari luar kawasan. Dalam mencapai kepentingan nasional sebuah negara membutuhkan *power* yang cukup jika dalam pencapaian kepentingan itu bersifat persaingan. Salah satu cara Untuk meningkatkan kekuatan suatu negara akan meminta bantuan dari aktor lain yang sifatnya kerjasama atau aliansi. Adanya kekuatan dari luar yang terlibat dalam suatu kawasan akan mendorong persaingan meluas yang awalnya di tingkat regional menjadi persaingan global antar kekuatan-kekuatan besar didunia (Barry Buzan O. W., 2003).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini juga mengambil rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya hingga penulis menemukan beberapa argumentasi penelitian untuk di teliti lebih lanjut. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis ambil sebagai referensi. Penulis menemukan data dari hasil

penelitian (Rivai M. R., 2019). Bahwasanya kehadiran aktor luar dalam sebuah konflik internal suatu negara menjadi salah satu penyebab lamanya durasi perang. Hal itu disebabkan karena semakin banyaknya kombatan yang terlibat, maka akan semakin banyak pula kepentingan yang saling bersinggungan untuk tercapai sehingga akan menjadi sangat sulit mencari solusi atau titik tengah dari konflik.

Upaya perdamaian pun menjadi sangat sulit karena para aktor luar yang terlibat lebih memprioritaskan kepentingan pribadi negaranya dalam konflik Suriah dibanding kepentingan aktor domestik itu sendiri. Melihat kondisi ini penelitian tersebut menyimpulkan bahwa konflik berkepanjangan disebabkan karena keterlibatan aktor luar dan perdamaian akan tercapai apabila para aktor yang terlibat mundur atas dasar pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan-pertimbangan normatif lainnya (Rivai M. R., 2019).

Kemudian penelitian tentang hubungan Rusia-Turki di Suriah yang dilakukan oleh dosen Universitas Hasanuddin yaitu Haydhar M. Bachtiar dan Agussalim Burhanuddin menemukan bahwasanya terdapat konstelasi yang terjadi antara Rusia dan Turki di Suriah dalam bentuk *hard balancing*. Rivalitas *hard balancing* antar kedua negara kuat tersebut mengakibatkan konflik di Suriah semakin berlarut-larut (Burhanuddin, 2019)

Penelitian terkait stabilitas Timur Tengah juga dilakukan oleh (Basundoro, 2020) dalam jurnal yang berjudul “Perang Proksi Kontemporer Arab Saudi-Iran Sebagai Bentuk Turbulensi Timur Tengah”. Dalam penelitian yang dilakukannya Basundoro menemukan bahwa rivalitas Arab Saudi-Iran di Timur Tengah terwujud dalam sebuah perang proksi. Basundoro meneliti pengaruh perang proksi antara Arab Saudi dan Iran terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dengan menggunakan teori *internal conflict* yang dikemukakan oleh Michael Brown. Sejatinya rivalitas antara Saudi-Iran sudah berlangsung sejak lama. Hal ini di akibatkan adanya persaingan sekterianisme aliran agama Islam antara penganut Sunni yang mayoritas berada di Arab Saudi dan Syiah yang mayoritas berada di Iran. Namun akibat adanya ketidakstabilan politik di beberapa negara di Timur Tengah pasca Arab Spring persaingan antara kedua negara Islam tersebut kembali memanas. Keduanya memainkan perang proksi dalam memenuhi kepentingannya dan juga memperluas hegemoninya di wilayah tersebut. Dalam penelitian tersebut menilai bahwa Kondisi ini menjadi penyebab adanya perimbangan kekuatan (*balance of power*) sehingga terjadi perang yang tidak berkesudahan di Timur Tengah (Basundoro, 2020).

Turbulensi di Timur Tengah di warnai oleh aliansi dan persaingan kekuatan negara-negara super power, kompetisi persenjataan dan alat militernya, dan permainan perang proksi. Dalam satu dekade terakhir sejak peristiwa Arab Spring, perang proksi mempengaruhi perang saudara yang

terjadi hingga saat ini di Suriah dan Yaman. Selama konflik masih terjadi maka rivalitas negara-negara besar termasuk Saudi-Iran masih akan berlangsung di Timur Tengah. Baik Saudi maupun Iran masing-masing mendukung aktor proksinya agar menang. Hal ini menyebabkan terjadinya perimbangan kekuatan sehingga aktor yang berperang akan terus saling berkompetisi sehingga menjadikan perdamaian hanya omong kosong belaka. Stabilitas kawasan di Timur Tengah juga bergantung pada rivalitas kedua negara ini (Basundoro, 2020).

Selanjutnya penelitian yang tulis oleh (Arini, 2021) menyebutkan bahwa konflik saudara di Libya sangat dipengaruhi oleh aktor eksternal. Kehadiran dua kubu yang di wakili oleh Turki dan Mesir dalam peneliatian ini semakin memperkeruh suasana. Turki dan mesir menjadi negara yang memiliki rivalitas dalam konflik ini. Seperti yang telah dijelaskan dalam beberapa penelitian lainnya bahwa ada banyak faktor yang menyebabkan negara-negara eksternal memiliki agend didalam konflik negara lain. Meskipun sama-sama negara muslim mayoritas Sunni, namun kali ini kepentingan mereka selain karena minyak, juga karena adanya perbedaan pandangan ideologi terkait kehadiran ikhwanul muslimin di Libya. Dalam penelitiannya ia menyimpulkan bahwa semakin buruknya situasi di Libya disebabkan karena keterlibatan aktor eksternal. Selain Turki ada banyak aktor eksternal yang terlibat dalam konflik saudara ini.

Aktor-aktor tersebut masing-masing memiliki kepentingan yang saling berseberangan. Kemudian dengan masuknya Turki dan Mesir

sebagai pemain proksi dengan landasan perbedaan ideologi memperburuk keadaan disana. Upaya perdamaian pun sangat sulit tercapai disebabkan negara yang terlibat tidak berfokus pada upaya perdamaian namun hanya fokus pada kepentingannya masing-masing. Dibutuhkan aktor yang netral dalam upaya media agar terciptanya kestabilan di Libya. Namun nampaknya hal itu sulit dilakukan (Arini, 2021).

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN